

## PERAN FISIOTERAPIS PADA PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA DALAM MENDUKUNG KEAMANAN NASIONAL

### *The Role of Physical Therapist in Disaster Management in Indonesia to Support National Security*

Nurul Mutmainnah Jamil, Fauzi Bahar, Yuli Subiakto

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat

#### Riwayat artikel

Diajukan: 28 Juni 2022

Diterima: 11 Oktober 2022

#### Penulis Korespondensi:

- Nurul Mutmainnah Jamil
- Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat

e-mail:

[jamilnurul77@gmail.com](mailto:jamilnurul77@gmail.com)

#### Kata Kunci:

Fisioterapis, manajemen bencana, keamanan nasional

#### Abstrak

**Pendahuluan:** Indonesia menghadapi tantangan frekuensi kejadian bencana yang cukup sering sebagai salah satu yang dapat mengganggu keamanan nasional. Data BNPB menyebutkan sepanjang tahun 2021 terjadi 3.093 angka kejadian bencana. Keterlibatan seluruh pihak sangat diperlukan dalam manajemen bencana di Indonesia, termasuk fisioterapis. Sayangnya, peran fisioterapis dalam kebencanaan di Indonesia masih belum dikenal, sehingga tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran fisioterapis pada kondisi kebencanaan di Indonesia berdasarkan dokumen kebencanaan internasional dan nasional. **Metode:** Penelitian ini merupakan review artikel yang diterbitkan pada jurnal online dari tahun 2017-2022, serta dokumen dari konferensi kebencanaan. Analisis deskriptif digunakan dalam review artikel ini. **Hasil:** Fisioterapis pada manajemen bencana secara ideal berperan dalam keempat fase penanggulangan bencana, diantaranya fase pencegahan dan mitigasi, fase kesiapsiagaan, fase tanggap darurat, dan fase pemulihan. Berdasarkan historis pelaksanaan kebencanaan di Indonesia dengan merujuk pada jurnal dan berita terdahulu, saat ini fisioterapi tidak begitu berperan nyata pada setiap fase kebencanaan, berbeda dengan dokumen-dokumen internasional yang mendukung peran fisioterapi dalam kebencanaan. **Simpulan:** perlu adanya kolaborasi dan integrasi utamanya antar tenaga medis sehingga membuka ruang implementasi peran fisioterapi sesuai dokumen kebencanaan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan medis dalam kebencanaan di Indonesia.

#### Abstract

**Background:** Disasters that often occur in Indonesia are one of the challenges in maintaining national security. BNPB data states that throughout 2021 there will be 3,093 disaster events. The involvement of all parties is indispensable in disaster management in Indonesia, including physiotherapists. Unfortunately, the role of physiotherapists in disasters in Indonesia is still unknown, so this paper aims to analyze the role of physiotherapists in disasters in Indonesia based on international and national documents. **Methods:** This study is a review of articles published in online journals from 2018 to 2022, as well as documents from disaster conferences. **Results and Discussion:** Physiotherapists in disaster management ideally play a role in the four phases of disaster management, including the prevention and mitigation phase, the preparedness phase, the emergency response phase, and the recovery phase. Based on the history of disaster implementation in Indonesia by referring to previous journals and news, currently, physiotherapy does not play an ideal role in every phase, in contrast to international documents that support the role of physiotherapy in disasters. **Conclusion:** it is necessary to hold collaboration and integration mainly between medical personnel to open up space for the implementation of the role of physiotherapy following international disaster documents to improve the quality of medical services in disasters in Indonesia.

## PENDAHULUAN

Letak Geografis, Demografis, Sosiologis dan Historis Indonesia menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial (Wardyaningrum, 2014). Secara geografis, Indonesia terletak pada jalur lingkaran bencana gempa (*ring of fire*), dimana terdapat batas-batas tiga lempengan besar dunia yaitu Lempengan IndoAustralia, Eurasia dan Pasifik yang dapat menyebabkan berbagai bencana alam yang besar jika lempengan-lempengan tersebut bergerak atau bertabrakan. Tidak hanya itu, Indonesia juga memiliki 500 gunung berapi dimana 127 yang masih aktif, memiliki 5.000 sungai besar dan kecil yang 30% diantaranya melintasi wilayah pemukiman penduduk.

Bencana yang termasuk dalam salah satu jenis ancaman nirmiliter yang dapat mengancam keselamatan umum, dimana unsur utama yang bertindak adalah pemerintah dan didukung dengan unsur lainnya (Wulandari, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, Bencana alam didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan faktor penting yaitu adanya korban, baik korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Republik Indonesia No 24 Tahun 2007). Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sepanjang tahun 2021, terhitung dari 1 Januari sampai 31 Desember telah terjadi 3.093 angka kejadian bencana yang dikutip dalam kaleidoskop bencana Indonesia tahun 2021 (Kompas, 2021).

Meskipun terjadi penurunan frekuensi kejadian bencana sebanyak 33.5% dari tahun 2020, tetapi berdasarkan kajian BNPB, terapat kenaikan dampak bencana, yang didalamnya termasuk jumlah korban meninggal dunia yang mengalami kenaikan 76.9%, korban luka-luka sebanyak 2180.5%, jumlah pengungsi kejadian

bencana dengan kenaikan 24%, dan 116.3% rumah rusak. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa tingginya dampak bencana pada tahun 2021 tidak bisa terlepas dari pandemi Covid-19 yang terjadi sampai hari ini.

Di dalam Undang-Undang Kebencanaan ini, juga telah ditekankan pada pasal 1 poin 5 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tenaga kesehatan mengambil peran yang penting di setiap fase kebencanaan, mulai dari prabencana, tanggap darurat, hingga pascabencana. Peran tenaga kesehatan kemudian lebih dipatenkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang penanggulangan krisis kesehatan, dimana Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, korban luka/sakit, pengungsian, dan/atau adanya potensi bahaya yang berdampak pada kesehatan masyarakat yang membutuhkan respon cepat di luar kebiasaan normal dan kapasitas kesehatan tidak memadai (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019).

Situasi krisis kesehatan sering ditemui pada kondisi tanggap darurat bencana, rehabilitas dan rekonstruksi, dimana pada kondisi ini kita tentu memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten pada bidangnya, dalam rangka penyelamatan manusia dan pengembalian kedalam masyarakat secara normal pascabencana. Dalam Sendai Framework For Disaster Risk Reduction, dinyatakan bahwa tujuan pada kerangka penanganan kebencanaan adalah untuk mencegah ancaman baru dan mengurangi resiko bencana yang telah ada, dengan menggunakan langkah-langkah terpadu dan inklusif dalam berbagai bidang secara terukur agar dapat mencegah dan mengurangi keterpaparan hazard dan kerentanan terhadap bencana, serta

meningkatkan kesiapsiagaan dalam berbagai respon kebencanaan (PRB, 2015). Kesiapan respon dan efektivitas pemulihan selalu menjadi perhatian pada suatu kejadian bencana. Fisioterapi merupakan salah satu tenaga kesehatan dengan fokus pada pemulihan gerak dan fungsi gerak. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi menjelaskan bahwa profesi ini merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutik dan mekanis) pelatihan fungsi, dan komunikasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Beberapa kejadian bencana *quick onset*, atau bencana yang terjadi dengan cepat dan tiba-tiba, dapat menelan korban jiwa dan korban-luka-luka dengan berbagai jenis trauma dan disabilitas. Dengan fungsi utama pada rehabilitasi gerak dan fungsi gerak, Fisioterapis memegang peranan penting dalam peningkatan kemandirian korban bencana dengan disabilitas baru. Merujuk pada gempa Palu yang terjadi pada 2018 lalu menunjukkan sebanyak 20 korban bencana gempa dan tsunami menjadi penyandang disabilitas baru (Rudiana, 2018).

Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan yang dapat berkontribusi tidak hanya pada fase rehabilitasi, tetapi pada seluruh fase penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Sayangnya, konsep dimana fisioterapi memiliki peran dalam setiap tahap penanggulangan bencana masih tergolong baru dan tidak begitu dikenal di Indonesia. Trivedi dan Rathod melaporkan bahwa peran fisioterapis yang tidak jelas dapat membatasi keefektifan penanganan di lapangan. Oleh sebab itu, fenomena ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih besar tentang fisioterapis pada respon

bencana (Navjyot & Rathod, 2017). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran fisioterapis sebagai tenaga kesehatan pada kondisi kebencanaan di Indonesia berdasarkan dokumen kebencanaan internasional dan nasional.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan review artikel yang diterbitkan pada jurnal online dari tahun 2017-2022 serta dokumen dari konferensi kebencanaan terkait dengan topik 'Peran Fisioterapi pada Situasi Kebencanaan'. Artikel review diambil berdasarkan kriteria tertentu, yakni jurnal nasional/internasional yang mengkaji keterlibatan fisioterapi pada penanggulangan bencana serta jurnal terakreditasi Sinta dan/atau internasional. Dalam review artikel ini mengambil lima jurnal dengan kriteria tersebut. Analisis deskriptif digunakan dalam review artikel ini.

Artikel-artikel maupun pedoman tersebut ditelaah secara kritis untuk mendapatkan intisari dari informasi yang diperlukan yang disajikan secara singkat pada tulisan ini. Uraian dan argumentasi yang mendalam kemudian diberikan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fenomena yang dibahas dalam artikel yang diulas

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction merupakan suatu pedoman kebencanaan yang telah disepakati beberapa negara terkait fokus pengurangan resiko bencana untuk tahun 2015-2030. Fokus utama pada dokumen yang dipedomani selama 15 tahun tersebut adalah hasil akhir berupa pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana. Empat tindakan prioritas dari deklarasi Sendai terkait PRB di antaranya memahami resiko bencana, penguatan tata kelola risiko, investasi PRB untuk Resiliensi, dan peningkatan manajemen resiko. Fisioterapis sebagai sebuah profesi

kesehatan berperan pada dua tindakan prioritas, yakni investasi PRB untuk resiliensi dan peningkatan manajemen resiko.

Beberapa dokumen internasional menjelaskan secara rinci terkait peran fisioterapi dalam kebencanaan. American Physical Therapist Association (APTA) menjabarkan peran fisioterapis berdasarkan fase sebelum bencana yang mencakup perencanaan dan kesiapsiagaan, serta fase kejadian bencana yang mencakup respon dan pemulihan (APTA, 2020). Dokumen internasional lain yakni World Confederation of Physical Therapy (WCPT) dimana pada dokumen ini, WCPT menjelaskan secara rinci terkait peran fisioterapi yang terbagi dalam fase kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan.

Di Indonesia, dokumen kebencanaan yang ada hanya menyebutkan peran tenaga kesehatan secara holistik dan tidak terfokus pada masing-masing tenaga kesehatan, termasuk didalamnya pelayanan kesehatan sebagai salah satu poin penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat. Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) sebagai organisasi fisioterapi tertinggi, sempat memberitakan dalam websitenya terkait peran fisioterapi dalam kebencanaan di Lombok tahun 2018 lalu, yang berputar pada pemberian bantuan bersifat materi layanan rehabilitasi korban bencana, serta kolaborasi multidisiplin dalam penanganan trauma pada anak.

Berdasarkan historis pelaksanaan kebencanaan di Indonesia dengan merujuk pada jurnal dan berita terdahulu, saat ini fisioterapi sebagai salah satu cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada restorasi gerak dan fungsi gerak tidak begitu berperan nyata pada setiap fase kebencanaan, berbeda dengan dokumen-dokumen internasional yang mendukung peran fisioterapi dalam kebencanaan.

## PEMBAHASAN

### Bencana di Indonesia

Bencana berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 didefinisikan sebagai

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007).

Indonesia terkenal sebagai “laboratorium bencana” bukanlah tanpa sebab. Negara ini, faktanya, mengalami berbagai jenis bencana dengan beragam intensitas dan frekuensi setiap tahunnya. Terhitung di tahun 2021 kemarin, terkonfirmasi oleh BNPB sebanyak 5.402 kejadian bencana. Dampak bencana yang terjadi menyebabkan 728 jiwa meninggal dunia, 87 orang hilang, 14.915 korban luka, dan 7.630.692 korban menderita dan mengungsi. Tingginya angka korban terdampak serta kerugian harta benda menjadi sebuah indikator bahwa penanganan kebencanaan di Indonesia harus mendapatkan perhatian lebih, tidak hanya oleh pemerintah sebab sejatinya penanggulangan bencana melibatkan aspek pentahelix, dimana diantaranya pemerintah, badan usaha, akademisi, media massa, dan masyarakat.



**Gambar 1.** Kaleidoskop Bencana di Indonesia Tahun 2021 (BNPB, 2022)

Sementara itu, sejalan dengan perubahan arah fokus kebencanaan dunia dari respon tanggap darurat ke pencegahan dan mitigasi, Indonesia dengan BNPB sebagai *leading sector*nya telah mengeluarkan buku Rencana Nasional

Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, dengan visi penanggulangan bencana 2020-2024: “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana Untuk Pembangunan Berkelanjutan.”

RPJMN 2020-2024 berskala prioritas pembangunan yakni mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing (BNPB, 2020). Hal ini tertuang dalam kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang lebih terfokus pada fase mitigasi dan kesiapsiagaan, dimana kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 terdiri atas:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang efektif dan efisien, dengan semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana yang ada.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal.
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik.

### **Konsep Manajemen bencana**

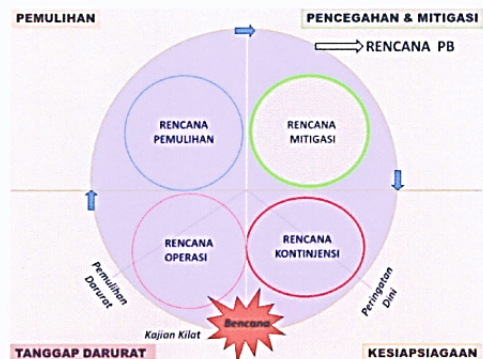
Merujuk dari dokumen Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa manajemen bencana terbagi atas empat fase penanggulangan,

yang dijelaskan sebagai berikut (BNPB, 2008):

1. Pada tahap prabencana saat tidak terjadi bencana dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan) yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan /bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi.
2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).
3. Pada Saat Tangap Darurat dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan), merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Rencana penanggulangan bencana dan kesiapsiagaannya merupakan dua fase prabencana. Kedua fase ini berfokus pada pengurangan resiko bencana, dimana secara aplikatif, PRB dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas masyarakatnya,

pengurangan bahaya (hazard), atau pengurangan kerentanan. Saat ini, BNPB dan berbagai lembaga terkait menerapkan program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas, dimana hal ini memfokuskan upaya PRB dengan menempatkan masyarakat sebagai inti dari kegiatan PRB, dengan peningkatan kapasitas dan kemandirian.



**Gambar 2.** Manajemen Bencana (Sumber: BNPB, 2008)

### **Fisioterapi pada Fase Pencegahan dan Mitigasi**

Fase pencegahan dan mitigasi merupakan fase dimana tidak terjadi bencana. Pada fase ini, dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan) dan rencana mitigasi. Pedoman American Physical Therapy Association (APTA) terkait peran fisioterapi dalam penanggulangan bencana merincikan fisioterapi prabencana dalam perencanaan dan kesiapsiagaan bencana, diantaranya berpartisipasi dalam kebijakan dan perencanaan strategis serta mengembangkan fasilitas darurat untuk kesiapsiagaan (APTA, 2020).

Jurnal lain yang membahas peran fisioterapis pada kebencanaan di Filipina menyebutkan beberapa peran fisioterapis pada fase pencegahan dan mitigasi, melakukan analisis situasional dari masyarakat untuk membantu dalam perencanaan dan perancangan bencana program pengelolaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dimana fisioterapis sebagai tenaga kesehatan yang berfokus pada rehabilitasi gerak dan fungsi gerak

dapat lebih berfokus pada kelompok rentan seperti orang-orang dengan disabilitas, maupun ketersediaan kebutuhan bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil, dan disabilitas (Chua, Didi, & Obra, 2022).

Selain terkait keterlibatan fisioterapi dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dan regulasi lainnya, pada tahap ini fisioterapi juga berperan dalam intervensi proaktif, seperti membantu perencanaan dan merancang infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas di masyarakat, yang dapat memudahkan proses evakuasi saat bencana terjadi. Peran lain fisioterapis dalam fase pencegahan dan mitigasi yakni turut dalam pemberian edukasi kepada masyarakat terkait peningkatan kapasitasnya dalam menghadapi bencana.

Jurnal kesehatan internasional yang membahas tentang fisioterapi pada manajemen bencana di Nigeria menjelaskan lebih lanjut terkait peran fisioterapi pada peningkatan kapasitas, dimana secara rinci kapasitas di dalamnya termasuk sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan infrastruktur. Fisioterapi berperan dalam perencanaan penanggulangan bencana, dimana didalamnya termasuk pengadaan dan penyediaan peralatan, kegiatan pelatihan, pengembangan rencana strategis untuk koordinasi, evakuasi, dan informasi publik (Ojukwua et al, 2021). Peran fisioterapi pada fase pencegahan dan mitigasi di atas merujuk pada dokumen Standar Teknis Minimal dan rekomendasi WHO untuk Rehabilitasi terkait fisioterapi yang tergabung dalam tim medis darurat.

### **Fisioterapi pada Fase Kesiapsiagaan**

Fase kesiapsiagaan merujuk pada tahap prabencana yang terdapat potensi bencana. Pada tahap ini dilakukan penyusunan Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat. Beberapa dokumen maupun jurnal fisioterapi menggabungkan fase kesiapsiagaan dan fase pencegahan dan mitigasi, meskipun beberapa dokumen

juga membedakan dua fase ini. Tujuan utama fase kesiapsiagaan yakni memastikan terbangunnya kesiapan masyarakat sehingga dapat bereaksi cepat saat bencana terjadi. Peran fisioterapi pada fase kesiapsiagaan meliputi pelibatan profesi dalam rencana kontigensi, pembangunan kapasitas baik internal dengan meningkatkan kemampuan praktis terhadap kondisi-kondisi kegawatdaruratan yang kerap terjadi saat bencana, maupun membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait, serta peningkatan pengetahuan fisioterapis terkait manajemen bencana (Chua, Didi, & Obra, 2022).

Pada fase ini, seluruh pihak menyadari akan ancaman yang berpotensi terhadap kejadian bencana di suatu daerah. Selain berfokus pada pembangunan fasilitas dan perbaikan regulasi, pada fase kesiapsiagaan juga lebih menitikberatkan pada rencana kontijensi, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pihak-pihak terkait secara lebih aplikatif. Fisioterapis harus turun serta dalam penyusunan rencana kontijensi, utamanya ikut menyusun alur evakuasi yang efektif berdasarkan jenis bencana, serta memastikan alur evakuasi yang ramah kelompok rentan seperti orang tua dan orang dengan disabilitas.

Dalam penanggulangan bencana di Indonesia, kita mengenal istilah penta helix atau kerjasama antar sektor dalam penanggulangan bencananya, fisioterapis sebagai tenaga medis harus menjalin kerjasama dengan pihak lain yang ikut berkontribusi dalam penanggulangan bencana. fisioterapis dapat memberikan pelatihan terkait kesiapsiagaan, ataupun memberikan latihan kebugaran dan aktivitas fisik yang terukur khususnya pada kelompok disabilitas agar memungkinkan untuk menyelamatkan diri sendiri saat bencana terjadi.

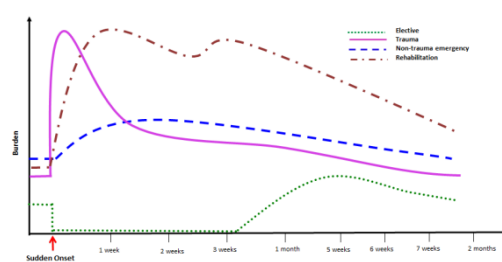
Selain itu, fisioterapis juga harus memperhatikan internalnya, dalam hal ini sesama fisioterapis juga harus dilatih untuk meningkatkan respon mereka saat situasi bencana. selain meningkatkan pengetahuan terkait manajemen bencana, secara

berkesinambungan, fisioterapis harus terus melakukan pembaharuan keilmuan terkait respon cepat dan metode penanganan pada berbagai kasus yang sering ditemui di lapangan.

### **Fisioterapi pada Fase Tanggap Darurat**

Tanggap darurat adalah fase dimana bencana terjadi. Pada fase ini, fisioterapis berperan dalam koordinasi dengan profesi medis di lapangan terkait tindakan perawatan pasien, termasuk penyediaan rehabilitasi fase akut korban bencana. WCPT dalam laporannya menyebutkan bahwa peran fisioterapis pada fase tanggap darurat tidak saja terbatas pada penyediaan rehabilitasi fase akut, namun juga pada asesmen, koordinasi, membantu dalam pemberian dukungan psikososial, serta advokasi (WCPT, 2016).

Respon darurat merupakan periode waktu kritis, dimana waktu optimal untuk menyelamatkan jiwa terjadi pada 24 jam pertama. Kerjasama antar seluruh tenaga medis yang terkait sangat diperlukan, dalam menyediakan pelayanan medis darurat yang efektif. Pada masa ini, menyelamatkan nyawa korban merupakan prioritas utama, meskipun selanjutnya, beberapa tahun belakangan fokus kesehatan internasional juga mulai merambat pada manajemen cedera traumatis dan pemasalahan kesehatan terkait (WCPT, 2016). Dalam situasi kebencanaan, sebagian besar penanganan kesehatan tidak selesai pada respon tanggap darurat saja, bahkan perawatan kesehatan bagi cedera akut biasanya terus berlanjut beberapa minggu bahkan dalam kurun waktu yang lebih lama (Bartels & VanRooyen, 2012).



**Gambar 3.** Kurva kebutuhan operasi dan rehabilitasi berdasarkan waktu pada bencana *quick onset* (Sumber: World Confederation of Physical Therapist)

Pada kurva di atas dapat dilihat bahwa setelah kejadian bencana, kebutuhan medis akan beberapa kasus seperti trauma, kegawatdaruratan nontrauma, serta sehabilitasi akan meningkat tajam pada periode waktu satu minggu pasca bencana, dan mengalami penurunan stabil, tetapi dapat dilihat bahwa bahkan setelah tujuh minggu pascabencana, kebutuhan akan penanganan kasus-kasus medis ini masih terus ada. Kolaborasi dan integrasi terpadu antar seluruh profesi kesehatan, seperti dokter, ahli bedah, perawat, psikolog, bedah ortopedi dan trauma, fisioterapis, radiografis, dan apoteker, dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal bagi para korban bencana (Ojukwua et al, 2021).

### **Fisioterapi pada Fase Pemulihan**

Fase pemulihan meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Jurnal fisioterapi pada manajemen bencana di Nigeria menggarisbawahi peran fisioterapi pada fase ini mendukung kelompok rentan termasuk disabilitas baru dalam menerima tindakan rehabilitasi lanjutan, serta membantu adaptasi korban bencana untuk dapat bergabung kembali ke masyarakat (Ojukwua et al, 2021). Selain penanganan disabilitas pascabencana, fisioterapis juga dapat berperan dalam penyediaan layanan rehabilitasi, berpartisipasi pada peningkatan program yang ada di masyarakat, serta keterlibatan pada rencana rehabilitasi pasca-bencana di daerah tersebut.

Sejalan dengan pernyataan di atas, WCPT Report juga menggarisbawahi peran fisioterapis pada fase pemulihan, seperti melanjutkan program rehabilitasi dari fase tanggap darurat ke fase pemulihan, mengadvokasi dan turut serta dalam penyusunan program rekonstruksi inklusif, membantu dalam pembangunan kapasitas

masyarakat agar sistem kemasyarakatan kembali normal, serta turut serta sebagai bagian dari gugus tugas multi-disiplin yang mempersiapkan program jangka panjang untuk layanan rehabilitasi bagi korban bencana.

### **KESIMPULAN**

Indonesia menghadapi tantangan frekuensi kejadian bencana yang cukup sering. Keterlibatan seluruh pihak sangat diperlukan dalam manajemen bencana di Indonesia, termasuk fisioterapis sebagai salah satu profesi kesehatan. Sayangnya, peran fisioterapis dalam kebencanaan di Indonesia masih belum dikenal dan lebih cenderung dimasukkan dalam fase tanggap darurat saja, padahal merujuk dari dokumen World Confederation for Physical Therapy, fisioterapis secara ideal dapat berkontribusi pada keempat fase penanggulangan bencana, seperti mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan

Fisioterapis dalam fase pencegahan dan mitigasi berpartisipasi dalam kebijakan dan perencanaan strategis serta pengembangan fasilitas darurat untuk kesiapsiagaan; fungsi fisioterapis pada fase kesiapsiagaan meliputi pelibatan dalam rencana kontingensi, membangun kapasitas, dan kerjasama dengan pihak lain, serta peningkatan pengetahuan fisioterapis terkait manajemen bencana; fisioterapis dalam respon tanggap darurat berperan dalam koordinasi dengan profesi medis di lapangan dan penyediaan fasilitas; serta fisioterapis pada fase pemulihan berperan dalam penyediaan layanan rehabilitasi.

Setelah melihat peran dan fungsi fisioterapi pada penanggulangan bencana secara ideal, maka perlu diadakan kolaborasi dan integrasi dengan seluruh pihak kebencanaan berdasarkan dokumen kebencanaan internasional, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan medis dalam kebencanaan di Indonesia. Selain itu, selain kolaborasi yang terintegrasi, fisioterapi juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pada ranah regulasi

terkait penanggulangan bencana di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- American Physical Therapist Association. (2020). *The Role of the PT and PTA in Disaster Management*. USA: American Physical Therapist Association.
- Bartels S, A., & VanRooyen, M. (2012). Medical complications associated with earthquakes. *Lancet*, 748–57.
- BNPB. (2008). *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2020). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BNPB. (2022, February 17). BNPB Verifikasi 5.402 Kejadian Bencana Sepanjang Tahun 2021. Retrieved May 24, 2022, from [bnpb.go.id: https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021](https://bnpb.go.id/berita/bnpb-verifikasi-5-402-kejadian-bencana-sepanjang-tahun-2021)
- Chua, F. C., Didi, C., & Obra, N. N. (2022). Framework for the Priority Actions of Filipino Physical Therapists in Disaster Risk Reduction and Management. *Philippine Journal of Physical Therapy*, 20.
- Kompas. (2021, December 31). BNPB: Jumlah Bencana 2021 Turun tapi Dampak Bencana Naik. Retrieved April 10, 2022, from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/12/31/190000565/bnpb--jumlah-bencana-2021-turun-tapi-dampak-bencana-naik?page=all>
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan No. 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Navjyot.S.Trivedi, & Rathod, P. V. (2017). *Physiotherapy in Disaster Management: Physiotherapist View*. NJIRM 2017; Vol. 8(4), 2.
- Ojukwua, C. P., Ezea, O. G., Uduonua, E. M., Okemuoa, A. J., Umunnahb, J. O., Edea, S. S., et al. (2021). Knowledge, practices and perceived barriers of physiotherapists involved in disaster management: a cross-sectional survey of Nigeria-based and trained physiotherapists. *International Health* 2021; 13: 497–503, 501.
- Platform Nasional PRB. (2015). *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*. Sendai: BNPB-PRB.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Rudiana, P. A. (2018, Oktober 27). Kondisi Difabel Baru Usai Tanggap Darurat Bencana Palu Donggala. Retrieved April 14, 2022, from Tempo: <https://difabel.tempo.co/read/1140378/kondisi-difabel-baru-usai-tanggap-darurat-bencana-palu-donggala/full&view=ok>
- Wardyaningrum, D. (2014). Perubahan Komunikasi Masyarakat Dalam Inovasi. *ASPIKOM*, 2(3), 179.
- World Confederation of Physical Therapist. (2016). *The Role Of Physical Therapist in Disaster Management*. London: World Confederation for Physical Therapy.
- Wulandari, R. (2017). Analisis Kesiapan pemerintah daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Menghadapi Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*, 1.